

## DEMOKRASI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Oleh:

**H. Nihaya M**

*Jurusan Aqidah & Filsafat Islam*

*Fakultas Ushuluddin & Filsafat*

*UIN Alauddin Makassar-Gowa*

*Jl. St. Alauddin Lorong Salemba No. 95 Makassar*

### Abstract

*Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.*

### Keywords

*Demokrasi-Problematika-Indonesia*

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi**

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

## ***B. Demokrasi di Indonesia***

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah

mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 2004

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.

Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan modernitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain

itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia *chaos* yang dapat mengakibatkan perpecahan.

### ***C. Perkembangan Demokrasi di Indonesia suatu Harapan***

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang

saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang diperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasangan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasangan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.

Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.

Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi "prestasi" yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor. Namun di sisi lain, para pengemplang dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mendapat pengampunan yang tidak sepadan dengan "dosa-dosa" mereka terhadap perekonomian. Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan dukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini juga memperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai organisasi Islam. Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar

dari kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah, ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidak diperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.

#### ***D. Pandangan Tokoh Muslim tentang Demokrasi***

Realitas di dunia yang positif ini menunjukkan bahwa demokrasi- dari-rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat- menjadi perhatian serius kemanusiaan se jagad raya. Ia adalah sebuah peradaban, obyek misi kemanusiaan, dan tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Di Indonesia yang tercinta ini, gagasan demokrasi dan demokratisasi terus menggulir seiring dengan dinamika perpolitikan Indonesia.

Dalam masyarakat Islam, sebagian ulama dan penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan doktrin Islam sebagai agama mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu, sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas.

Mengenai masalah hubungan Islam dengan demokrasi, Nurcholish mengemukakan landasan etik dan konsep utama dari demokrasi sebagai berikut:

*Pertama*, landasan etik. Pada landasan ini Nurcholish mengemukakan: (1). Manusia memikul akuntabilitas atas sikap tindakannya di dunia, setelah ia hidup, dan sesudah mati.(2). Perlu sikap jiwa yang mampu menahan diri. (3). Mengingat bahwa upaya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi itu sering menghadapi kenyataan-kenyataan yang bertentangan, seperti yang dikemukakan Bung Hatta

bahwa kebebasan yang tak terkendali akan mengundang lawan kebebasan itu sendiri, yaitu tirani.

*Kedua*, konsep demokrasi. Bagi Nurcholish, intisari demokrasi adalah proses dinamis ke arah perbaikan sehingga pendefenisian yang terlalu kaku dan bersifat final tidaklah tepat.

Menurut Nurcholish, negara demokrasi adalah negara memiliki sistem terbuka sehingga promosi sosial, mobilitas vertikal tidak lagi berdasarkan hal-hal kenisbatan (askriptif), misalnya suku apa, bahasa daerah apa, keturunan siapa, itu tidak lagi relevan, tetapi yang dipentingkan adalah kemampuan dan profesionalitas yang dapat dibentuk oleh pendidikan.

Dalam aspek pemikiran demokrasi, Nurcholish mengemukakan bahwa terjadi dua problem tentang hubungan agama dan demokrasi:

*Pertama*, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi.

*Kedua*, problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya<sup>70</sup>

Bagi kalangan neo-modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi.

Menurut Abdurrahman Wahid nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok. Ada tiga hal nilai pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud *kebebasan* di sini adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua *keadilan*, merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak untuk menentukan

jalan hidupnya, tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya. Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya. Nilai demokrasi yang ketiga *syura* (musyawarah), artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan.

Analisis Nurcholish mengenai seluk-beluk demokrasi banyak berlandaskan teks Alquran tentang kebebasan dan tanggung jawab individual (QS. 6: 94), tentang kebebasan eksperimen (QS. 18: 29), tentang sikap kebijaksanaan (QS. 16: 125), tentang keadilan (QS. 5: 58, 4: 135), dan tentang musyawarah (QS. 3: 159, 42: 38). Nilai-nilai fundamental ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslim mampu mengoperasionalkannya. Nurcholish sampai pada kesimpulan bahwa Islam sepanjang ajaran agamanya tidak menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama. Ukuran kebaikan ialah kemanusiaan universal meliputi sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas.

Bagi Nurcholish terdapat banyak titik temu antara agama dan demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita untuk kebaikan semua, maka tidak heran jika penerimaan umat Islam terhadap demokrasi bersifat sangat alami.

Menurut Nurcholish, demokrasi itu sendiri adalah suatu proses. Meminjam istilah Abdurrahman Wahid, perlu usaha yang kontinu dalam mensosialisasikan demokrasi, sebab tanpa itu demokrasi mustahil berjalan. Tentang bagaimana cara mensosialisasikannya, Nurcholish mengatakan bahwa ada beberapa cara, *Pertama*, upayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Ini merupakan pendekatan normatif. *Kedua*, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman

Hanya saja perlu dikaji secara serius bahwa perkembangan demokrasi selama ini memiliki perbedaan antara lain; *Pertama*, Kehidupan demokrasi di era Orde Lama sebenarnya tidak dibelenggu, tetapi diberi kebebasan seluasnya, sehingga tidak dapat dikendalikan. Akibatnya terjadi konflik ideologis yang mengganggu kinerja pemerintahan. *Kedua*, Kehidupan demokrasi di era Orde Baru

dipersempit ruang gerakannya sehingga terjadi proses demokrasi yang sifatnya semu. Hal ini memperkokoh posisi pemerintah di bawah dominasi militer. Stabilitas terasa terjamin, pembangunan berjalan dengan baik, tetapi demokrasi dan pemenuhan HAM mengalami degradasi. Hal ini akhirnya dibayar mahal dengan gerakan reformasi yang menuntut perubahan, seiring dengan terjadinya krisis multidimensi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam stabilitas, dan menghancurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Menyikapi perkembangan demokrasi pada masa reformasi bergejolak, Nurcholish mengemukakan pokok-pokok pandangannya tentang reformasi politik Indonesia antara lain: *Pertama*, watak reformasi secara damai dan konstitusional dengan bentuk-bentuk reformasi fundamental, bukan sekedar tambal sulam. Untuk itu, Nurcholish menghargai sistem konstitusional, termasuk penyempurnaan konstitusi dengan melakukan lembaga amandemen. *Kedua*, rekonstruksi budaya politik termasuk akhlak dan moralitas politik. *Ketiga*, pentingnya pengawasan sosial, penghormatan terhadap kebebasan dan keadilan kekuasaan.

Dengan demikian, pandangan Nurcholish di atas dapat dipahami bahwa perundang-undangan sekarang ini tidak disakralkan, ia dapat diamandemen secara konstitusional, yang secara fundamental bukan sekedar tambal-sulam, melainkan diperlukan perbaikan budaya politik yang selama ini dilakukan secara kaku dan tertutup. Ke depan diperlukan kebebasan yang bertanggungjawab yang dilandasi hati nurani yang dapat melahirkan keadilan yang esensial sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat dan bermartabat. Gagasan-gagasan yang dilontarkan Nurcholish sendiri pada intinya menyatakan bahwa agama, baik secara teologi maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi.

### ***E. Tantangan dan Harapan***

Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia

dan nilai-nilai Islam. Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap

adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai.

### ***F. Kesimpulan***

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.

Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.

Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.

### **Daftar Pustaka**

- Efendi, Baktiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Printika, 2001.
- Greenawalt, Kent. "Civil Rights and Liberties" dalam *The Encyclopaedia Americana*, Vol. 7
- Hamka, *Islam: Revolusi Idiologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta:Pustaka Panjimas, 1984.
- Hari Zamharir, Muhammad. *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Hidayat, Komarudin. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perinial*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_, “Membangun Teologi dialogi dan inklusivistik,” dalam “*passing Over*” : *Melintasi batas agama*, Ed. Komaruddin Hidayat. Jakarta: PT. Gramedia, 2001
- Dunia Modern.” Bandung: Pustaka, 1994.
- H. Suminto, Aqib et. all. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*. Ciputat: LSAF, 1989.
- Krissantono (ed.). *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1976.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Lembaga Studi Agama dan Filsafat, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam; 70 tahun Harun Nasution*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_, “Cita-cita Politik Kita” dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Leppenas, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Nurcholish Madjid Cendekiawan dan Religiusitas: Kolom-kolom tabloid*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Dialog Keterbukaan* . Jakarta : Paramadina, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- \_\_\_\_\_, “Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal sebagai Pangkal Demokrasi Hak Azasi dan Keadilan.” Dalam *Ensiklopedi Islam* Jilid III. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi*(Jakarta: Paramadina, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Islam Tradisi, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- \_\_\_\_\_, “Cita-cita Politik Kita” dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting). *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Leppenas, 1983.
- \_\_\_\_\_, “Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia”, dalam *Prisma*, edisi ekstra. 1984
- \_\_\_\_\_, *Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusutas Masyarakat: Kolom-kolom Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahendra, Yusril Ihza. “Moral Islam Untuk Perdamaian.” dalam Dawam Raharjo (ed) *Agama dan Kekerasan*. Jakarta : 1985
- \_\_\_\_\_, (ed) *Fakta Dokumentasi Jilid 2* . Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1982.

- Nadroh, Siti. *Wacana keagamaan dan politik Nurcholish Majid*. cet. I; Jakarta: Rajawali, 1999.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: LSAF, 1989.
- Natsir, Muhammad. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1944* . Malaysia: Oxford University.
- Norman P. Barry. *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin's Press, 1981
- Paramadina, *Brosur Yayasan Wakaf Paramadina*. Jakarta: Paramadina, 1986.
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1993.
- Rahardjo, M. Dawam. "*Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Madjid*" Bandung: Mizan, 1998.
- Rais, Amin. *Islam Di Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta : Rajawali Pers, 1992.